

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah proses multidimensial yang mencakup berbagai perubahan baik struktur sosial-ekonomi, sikap masyarakat, dan institusi nasional disamping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berhubungan erat satu sama lain, tetapi ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita melalui transformasi ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. (Lestari *et al.*, 2021) Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi ekonomi, yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan nasional. (Wibowo, 2003)

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dilakukan pada tingkat yang lebih kecil, yaitu daerah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi menjadi indikasi keberhasilan suatu daerah dengan memperlihatkan trend pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka struktur perekonomian suatu daerah akan lebih cepat mapan. Karena pertumbuhan ekonomi akan mendorong pertumbuhan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan juga membantu mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. (Raynaldhi, 2016)

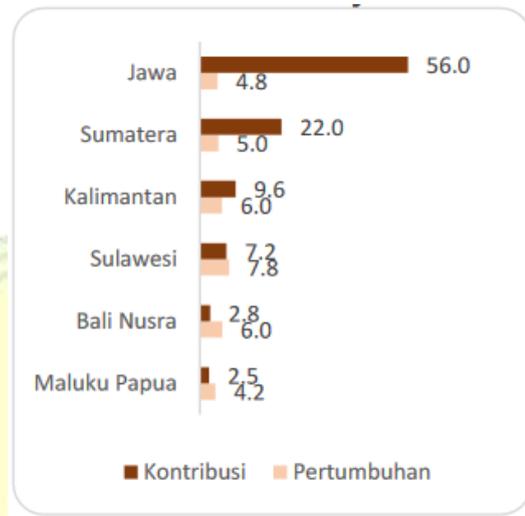
Menurut Sukirno (2006) “Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran dari perkembangan perekonomian dalam periode masa tertentu bila dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya”. (Sukirno, 2006) Peningkatan pendapatan nasional adalah tanda pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan nasional. Jika PNB atau PDB riil suatu negara meningkat, negara tersebut dianggap mengalami pertumbuhan ekonomi. (Wibowo, 2003)

Kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah tidak dapat dilepaskan dari pergeseran ekonomi global. Terlebih lagi, dalam sistem ekonomi terbuka, pergeseran ekonomi global akan memengaruhi ekonomi setiap negara, termasuk wilayahnya. (Aryanta & Indrajaya, 2022) Pada tahun 2020 tepatnya saat awal tahun, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, salah satunya terjadi di Indonesia akibat munculnya suatu wabah penyakit yaitu *Coronavirus Disease* atau yang biasa dikenal Covid-19. (Mita, 2020)

Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah berperan memahami kondisi sosial ekonomi, demografi, dan struktur ekonomi daerah selama pandemi, pemerintah daerah bertanggung jawab secara strategis untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi. Kebijakan yang ditetapkan dalam APBD adalah tolak ukur utama bagi pemerintah daerah untuk mendorong pemulihan perekonomian. (Hayati, 2022)

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia telah kembali normal setelah melewati pandemi COVID-19 selama kurang lebih dua tahun. Ini selaras dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kembali setelah pandemi dan dengan penanganan pandemi yang relatif lebih baik setiap tahunnya. (Primantoro, 2023) Meskipun situasi global terus berubah, ekonomi domestik terus bergerak didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat. Ekonomi Indonesia meningkat dengan cepat sebesar 5,31% di tahun 2022, secara spasial seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. (KKBPRI, 2023) Berikut adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan wilayah.



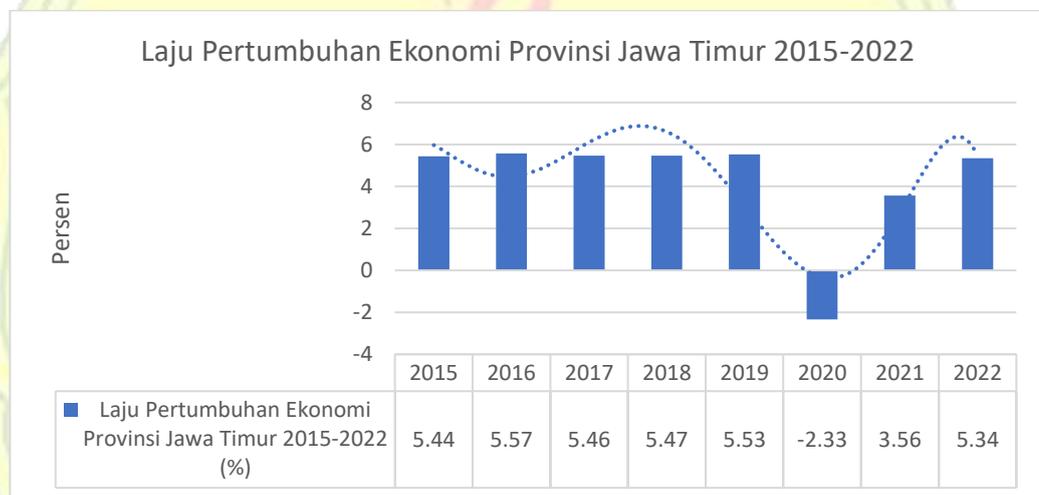
Gambar 1.1 Pertumbuhan dan Kontribusi Wilayah Indonesia Tahun 2022
Sumber (Bappenas, 2023)

Menurut BPS (2022) yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022 yaitu Pulau Jawa sebesar 56%, Pulau Sumatera sebesar 22%, dan Pulau Kalimantan sebesar 9,6%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa wilayah di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia serta mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat daripada daerah lain di Indonesia. (Kementerian PPN/Bappenas, 2023)

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dibagian timur Pulau Jawa dan merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia dan pada tahun 2014 sebagai penyumbang terbesar kedua di Jawa bagi perekonomian Indonesia dengan tingkat pertumbuhan sebanding dengan nasional dan provinsi-provinsi besar lainnya di Jawa. (Antonius, 2020) Secara nasional, Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 14,44%, menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta sebesar 17,23%. Hal ini disampaikan oleh Dadang Hardiwan, Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (Jatimprog, 2021) Industri pengolahan, perdagangan dan pertanian (12,80%) adalah tiga sektor lapangan usaha utama yang mendorong PDRB Jawa Timur. (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022)

Menurut BPS Jawa Timur (2021) Jawa Timur memiliki wilayah terluas

di antara 6 provinsi di Pulau Jawa yaitu 47.803,49 km². Secara geografis, Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik wilayah yang memiliki banyak potensi untuk berkembang karena letaknya yang strategis dan banyaknya objek seperti gunung, pantai, gua hingga air terjun yang ada hampir di setiap kabupaten dan kota. Jawa Timur juga dikenal sebagai pusat industri dan keuangan bagian Timur Indonesia. (Assidikiyah *et al.*, 2021) Sehingga daerah ini cocok untuk dilakukan objek penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

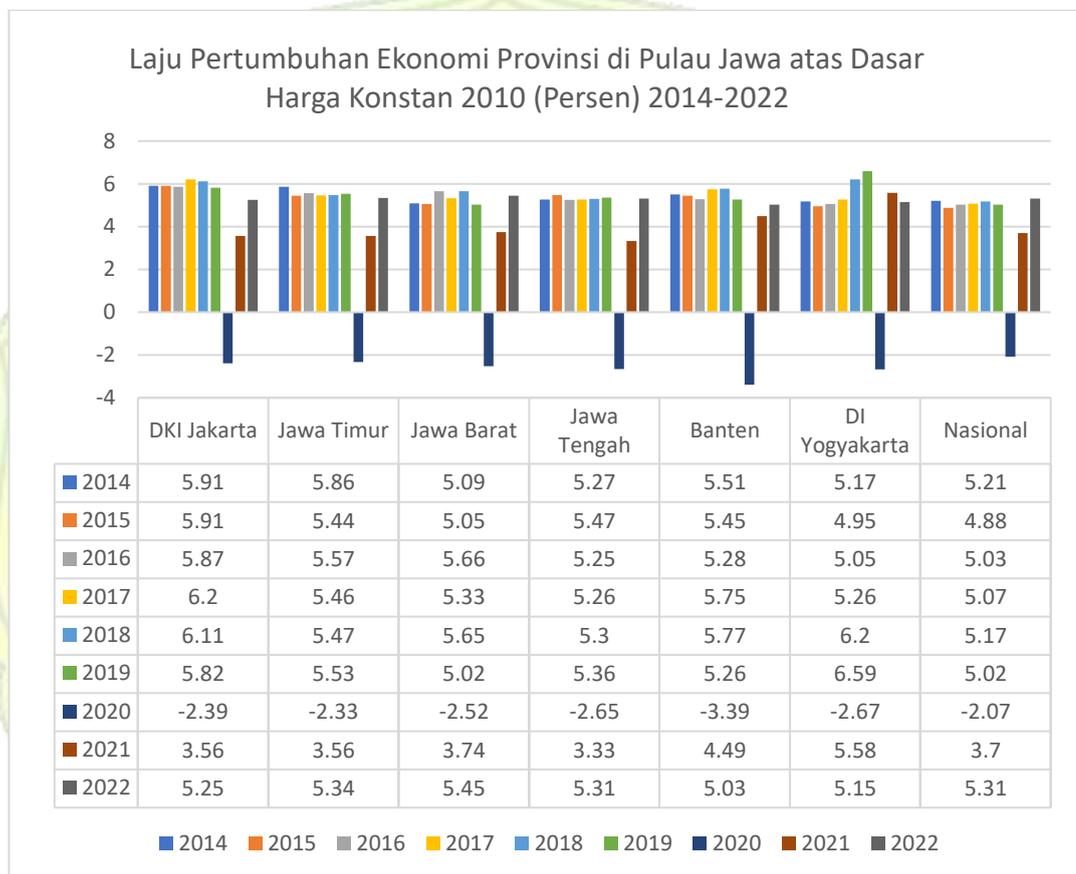


Gambar 1.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2015-2022

Sumber: (BPS Jawa Timur, 2022)

Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang bertfluktuasi dan hingga akhir 2019 cenderung mengalami penurunan. Secara rata-rata, pada tahun 2015-2019 laju pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan tinggi karena selalu berada diatas angka nasional. Pada tahun 2015 sebesar 5,44%, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,57%, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,46%, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,50%, dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 5,52%. Pada tahun 2020, sebagian besar aktivitas konsumsi terhambat akibat merebaknya virus Covid-19 sehingga menyebabkan turbulensi ekonomi dari sisi pengeluaran, penurunan tersebut cukup dalam

mencapai -2,33% dibawah angka nasional. (Putri & Rizal, 2022). Ditahun 2021 perekonomian mulai bangkit kembali sebesar 3,56% dan melanjutkan pertumbuhan positif. Berikut adalah laju pertumbuhan provinsi Jawa Timur dengan dibandingkan dengan laju pertumbuhan provinsi lain di Jawa.



Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa, Nasional

Sumber: (BPS, 2023)

Pada tahun 2014 Jawa Timur menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta. Disetiap tahunnya Jawa Timur bergeser posisinya dengan provinsi di Jawa yang lain. Pada tahun 2021 dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, Jawa Timur menempati peringkat keempat setelah DIY sebesar 5,58%, Banten sebesar 4,49%, dan Jawa Barat sebesar 3,74%. (Bank Indonesia, 2023) Hal ini membuat Jawa Timur bergeser menjadi menempati peringkat keempat penyumbang di Jawa bagi perekonomian Indonesia. Fenomena ini perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah Jawa Timur untuk

meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi supaya mencegah terjadinya kontraksi ekonomi dan perlu analisis lebih jauh mengenai faktor-faktor potensial yang mempengaruhi penurunan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Ahli Ekonomi Neo-Klasik Solow terdapat 3 komponen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: teknologi, penambahan modal, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pembangunan manusia. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tujuan dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan perekonomian modern karena pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi dimaksimalkan secara optimal, dan kualitas penduduk yang baik akan mampu berinovasi dalam mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada, Selain itu, tingginya pembangunan manusia mengakibatkan jumlah penduduk yang meningkat sehingga dapat menambah tingkat konsumsi. Hal ini akan mempermudah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (sukirno, 2006).

Standar tinggi rendahnya sumber daya manusia suatu daerah ditentukan oleh nilai IPM. Menurut Todaro (2000), tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia. Dimana, untuk mempertahankan pembangunan manusia yang berkelanjutan, pembangunan manusia sangat penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menyerap teknologi modern dan meningkatkan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran guna mempertahankan pembangunan manusia yang berkelanjutan. (Sari, 2017)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2021) tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber daya dalam kaitannya dengan teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Diharapkan tingkat pembangunan manusia ini mampu mempengaruhi proses produksi dengan meningkatkan produktivitas baik

dalam bidang barang maupun jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PDRB secara keseluruhan. Hal ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taqi *et al* (2021) di Pakistan yang menggambarkan pembangunan manusia berdampak pada pendapatan per kapita (PDRB per kapita), yang dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. (Taqi *et al.*, 2021) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa menyebutkan berdasarkan BPS Indonesia (2023) IPM Jawa Timur masih terendah di pulau Jawa. Berikut adalah tingkat IPM di Jawa Timur;



Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur, Nasional 2015-2022

Sumber (BPS Jawa Timur, 2022)

Berdasarkan informasi dari BPS, IPM Provinsi Jawa Timur diketahui pada tahun 2015 angka IPM sebesar 68,95 dibawah angka nasional yaitu 69,55 ditahun-tahun selanjutnya selalu mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2020 dilanda pandemi, IPM Jawa Timur tetap meningkat menjadi 71,71 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 72,75 atau dalam rentang periode tersebut berkembang 3,8% namun masih berada dibawah angka nasional yaitu 72.91. Tren pertumbuhan yang terus meningkat menjadi satu indikator positif, namun walaupun mengalami peningkatan IPM Jawa Timur masih dibawah rata-rata IPM nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk meningkatkan IPM Jawa Timur dimasa mendatang. Dalam hal ini menjadi modal penting dalam proses peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah, dimana dengan adanya peningkatan IPM yang konsisten diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (BPS, 2019)

IPM merupakan salah satu indikator untuk menentukan kemajuan pembangunan ekonomi yang mengukur tingkat kualitas fisik dan non-fisik penduduk, baik kesejahteraan tertentu, tingkat pendidikan dan faktor keuangan. (Suliswanto, 2012) Adapun pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan non-fisik menyimpulkan peningkatan dalam kemampuan dasar penduduk. Pertumbuhan ekonomi saling terkait dan berperan satu sama lain dengan pembangunan manusia. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi secara signifikan menentukan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik yang berhubungan dengan teknologi maupun kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pembangunan ekonomi. (Utami, 2020) Hal ini membuktikan bahwa IPM berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan Muqorrobin & Soejoto (2017) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi kualitas indeks pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan, sebaliknya bila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka indeks pembangunan manusia akan menurun. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utami (2020) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi disebabkan faktor konsumsi karena karakteristik masyarakat daerah tersebut pendapatannya lebih dialokasikan untuk tujuan konsumsi daripada untuk keseimbangan produktivitas sumber daya manusia. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Andriani (2021) yang menyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena kondisi perekonomian pada periode tersebut masih dipengaruhi oleh capaian indeks pembangunan manusia pada periode-periode sebelumnya. Namun hal ini bertolak belakang

dengan penelitian yang dilakukan oleh Najiya & Diah (2023) yang menyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena jumlah indeks pembangunan manusia masih dikatakan rendah, sehingga perlu peningkatan indeks pembangunan manusia yang tinggi supaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Todaro dan Smith (2011) menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada warganya dalam jangka panjang. Dengan kenaikan upah minimum bagi pekerja, daya beli pekerja akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong produktivitas kerja dan semangat kerja. Namun, bagi pengusaha yang menganggap upah sebagai biaya, kenaikan ini membuat mereka harus menyesuaikan gaji mereka dengan tingkat upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, pengusaha cenderung mengurangi jumlah pekerja yang mereka pekerjakan. (Najiya & Diah, 2023)

Upah minimum regional merupakan standar upah minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan kepada karyawan, buruh, atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup minimum yang layak (KHL) yang berlaku di provinsi bersangkutan. Upah adalah kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja dan terdiri dari jumlah uang yang diberikan kepadanya. Jumlah pengangguran di suatu daerah akan dipengaruhi oleh penetapan UMR yang dilakukan pemerintah, yang dapat berdampak positif atau negatif. (Aryanta & Indrajaya, 2022)

Menurut BPS Indonesia (2022) UMR Jawa Timur dari tahun 2015-2022 diurutkan terendah se-Indonesia setelah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat. Pada tahun 2015-2020 Jawa Timur menempati posisi ke-3 terbawah, lalu pada tahun 2021-2022 meningkat Jawa Timur menempati posisi ke-4 terbawah dan UMR ini selalu berada dibawah angka nasional. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, Jazuli, menganggap kenaikan upah minimum provinsi Jawa Timur di tahun 2022

terlalu rendah, sekitar 2,6% hingga 3%. Peningkatan itu tidak dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi regional dan laju inflasi bahan kebutuhan pokok. Dalam situasi seperti itu, taraf kesejahteraan pekerja menurun karena mereka tidak bisa menabung dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun sebaliknya, ketika upah pekerja naik, maka belanjanya terpenuhi, maka ekonomi akan meningkat. Maka perlu perhatian khusus pemerintah daerah Jawa Timur untuk menetapkan UMR dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang layak (Astuti, 2023)

Menurut Samuel (2015) Ketika upah minimum meningkat, pekerja mendapatkan lebih banyak daripada sebelumnya dengan jam kerja yang sama. Ini meningkatkan sikap positif terhadap pekerjaan dan meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Karena faktor produksi lainnya tersedia dan kondisi tempat kerja yang baik akan meningkatkan produktivitas dan output, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan upah dapat membuat pasar lokal lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. (Samuel, 2015)

Menurut Astuti (2022) peningkatan upah minimum regional tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah karena terdiri dari tiga komponen utama: sumber daya manusia (SDM), modal, dan investasi baru; peningkatan angkatan kerja yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryanta & Indrajaya (2022) yang berpendapat upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan, karena upah minimum yang rendah mampu beradaptasi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sangat rendah karena ketidakmampuan mereka untuk membeli barang-barang yang diperlukan, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aprilya & Juliprijanto (2022) yang menyatakan bahwa upah minimum regional berdampak signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena upah minimum bisa

mendorong semangat kerja yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurza & Nurnaddia (2023) yang menyatakan upah minimum memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Penerapan upah minimum memiliki pengaruh positif pada perekonomian negara maju dalam jangka panjang, tetapi memiliki pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi di negara berkembang karena menurut penelitian tersebut tidak semua kondisi ekonomi, seperti pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengangguran akan membaik dengan diterapkannya upah minimum. (Nurza & Nurnaddia, 2023)

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk. Menurut Aprilya & Juliprijanto (2022) Jumlah penduduk adalah jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah, baik lokal maupun nonlocal. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk yang lebih besar secara otomatis meningkatkan permintaan untuk barang dan jasa, semakin banyak orang yang harus bekerja untuk memenuhi permintaan ini. Menurut Todaro (2013), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja merupakan faktor positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah pekerja akan meningkatkan tingkat produksi. Selain itu, dikatakan bahwa efek positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan daerah untuk mempertahankan dan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih besar secara efektif. (Andhykha et al., 2018)

Menurut BPS Indonesia (2022) Jawa Timur merupakan provinsi ke-2 dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, setelah Jawa Barat. Menurut BPS Jawa Timur, pertumbuhan penduduk di Jawa Timur mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Jumlah penduduk yang meningkat secara otomatis menyebabkan peningkatan permintaan akan barang dan jasa, yang pada gilirannya membutuhkan lebih banyak orang untuk bekerja untuk memenuhi permintaan ini. (Habib, 2021) Namun, dampak negatif dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kualitas dan kesempatan

kerja akan menyebabkan pengangguran, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk mengatasi lonjakan jumlah penduduk (Aswanto, 2022)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2020) jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, hal ini dilihat dari jumlah penduduk di Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Adam Smith, yang menyatakan bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa dan bahwa alokasi sumber daya manusia memulai pertumbuhan ekonomi. Adam Smith juga percaya bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada pertumbuhan penduduk. Output dan hasil akan meningkat dengan pertumbuhan penduduk. (Wardani, 2021)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2021) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan kebutuhan konsumsi yang lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan dan mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, dimana angkatan kerja ini tidak dapat terserap sepenuhnya. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilya & Juliprijanto (2022) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2021) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena laju pertumbuhan penduduk masih fluktuatif sehingga tidak ada konsistensi terhadap tingkat konsumsi masyarakat setiap tahunnya.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan mengenai indeks pembangunan manusia, upah minimum regional dan jumlah penduduk

terdapat konsep keterikatan antar ketiga variabelnya dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan maka peneliti mengambil beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum regional dan jumlah penduduk terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi guna memperoleh kepastian dari penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh Laju Upah Minimum Regional terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, laju Upah Minimum Regional, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022
2. Mengetahui pengaruh Laju Upah Minimum Regional terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022
3. Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Pertumbuhan

Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022

4. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Upah Minimum Regional, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, serta dapat menambah referensi baru untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sarana pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah khususnya penerapan mengenai teori ekonomi yang ada.

- b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan sebagai referensi dan bahan masukan untuk diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur saat ini.

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*